

10-30-2022

KONSUMSI DAN REGULASI GANJA DI PRANCIS MASA EMMANUEL MACRON

Diella Amanda Nasution,
Program Studi Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
yakag56979@kazvi.com

Airin Miranda
Program Studi Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, airin.miranda@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura>



Part of the [Other Languages, Societies, and Cultures Commons](#), [Philosophy Commons](#), and the [South and Southeast Asian Languages and Societies Commons](#)

Recommended Citation

Nasution,, Diella Amanda and Miranda, Airin (2022) "KONSUMSI DAN REGULASI GANJA DI PRANCIS MASA EMMANUEL MACRON," *Multikultura*: Vol. 1: No. 4, Article 4.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura/vol1/iss4/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Multikultura by an authorized editor of UI Scholars Hub.



KONSUMSI DAN REGULASI GANJA DI PRANCIS MASA EMMANUEL MACRON

Diella Amanda Nasution, Airin Miranda

Program Studi Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Ledsom (2019), Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé Publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan difusi ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan dengan sumber data kebijakan-kebijakan terkait yang membuktikan bahwa kebijakan yang berlaku tidak efektif. Pelarangan keras kepemilikan dan konsumsi ganja menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan pemerintah dan negara Prancis. Hal ini lantas menimbulkan perdebatan dan protes terhadap pemerintah dari banyak pihak yang menuntut pemerintah untuk mengambil langkah legalisasi. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron kemudian memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminialisasi parsial serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif.

KATA KUNCI: Konsumsi Ganja, Regulasi Ganja, Pemerintahan Emmanuel Macron

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan legalisasi atau medikalisasi ganja semakin marak di negara-negara Barat. Pada akhir 2017, 29 negara bagian di Amerika (serta Washington DC) dan 18 negara anggota Uni Eropa telah mereformasi kebijakan larangan sebelumnya dengan mendekriminalisasi dan/atau medikalisasi ganja dalam yurisdiksi mereka. Namun, Prancis yang secara historis berada di garis depan penelitian medis dan ilmiah yang umumnya dipandang memiliki budaya bohemian dan progresif, secara mencolok tidak ada di antara daftar negara-negara yang mereformasi kebijakan anti ganja. Meskipun memiliki tingkat penggunaan ganja tertinggi di Uni Eropa, Prancis terus menegakkan undang-undang yang bisa dibilang paling



represif terhadap ganja di UE. (Guba, 2018). Ganja merupakan jenis psikoaktif terlarang yang paling sering digunakan di Eropa. Disebutkan oleh European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), diperkirakan setidaknya satu dari delapan orang dewasa muda (berusia 15-34 tahun) menggunakan ganja pada tahun sebelumnya di Uni Eropa (EMCDDA, 2018). Ganja juga merupakan jenis psikoaktif ilegal yang paling sering disebutkan dalam laporan pelanggaran hukum narkoba di Prancis. Sejak 1961, hukum internasional telah mendefinisikan ganja sebagai 'tanaman apa pun dari genus *Cannabis*, yang mencakup spesies *Cannabis indica*, *Cannabis sativa* dan varietas apa pun yang ditemukan di masa depan (PBB, 1961). Tanaman ganja biasanya dikontrol secara hukum ketika mampu menghasilkan substansi psikoaktif delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Perjanjian internasional mensyaratkan seluruh tanaman ganja dikendalikan di bawah hukum narkoba nasional, meskipun di beberapa negara Eropa ada pengecualian untuk tanaman yang memiliki konten THC tidak melebihi 0,2%, jika ditanam untuk diambil seratnya. Tidak ada hukum Uni Eropa yang diselaraskan tentang penggunaan ganja. Respons kriminal atau administratif terhadap pelanggaran penggunaan narkoba adalah tanggung jawab masing-masing negara anggota UE. Menurut Pasal 168 Perjanjian Fungsi Uni Eropa, "Uni Eropa akan membantu tindakan Negara-negara Anggota dalam mengurangi kerusakan kesehatan terkait obat-obatan terlarang, termasuk informasi dan pencegahan." (EMCDDA,2018).

Kepopuleran dan tingginya angka pengguna ganja terus menjadi topik yang menghasilkan kebijakan dan kepentingan publik yang signifikan, hal ini lantas memicu perdebatan tentang bagaimana pemerintah harus mengambil sikap. Penelitian mengenai ganja serta regulasi dan posisinya di masyarakat sudah banyak dilakukan sebelumnya, salah satunya adalah artikel berjudul *Evaluating alternative cannabis regimes* dalam *British Journal of Psychiatry* yang ditulis oleh Maccoun, R. dan Reuter, P pada tahun 2001. Artikel ini berisi pemaparan tentang kontroversi ganja di Amerika, Belanda, dan Australia. Penulis menganalisis hukum yang berlaku serta hukum alternatif yang dapat diterapkan dengan meninjau efek dari depenalisasi ganja di negara-negara tersebut. Hasil dari analisis perubahan hukum di Belanda menunjukkan bahwa depenalisasi kepemilikan sejumlah kecil ganja tidak meningkatkan prevalensi ganja, melainkan karena adanya promosi komersial. Sehingga penting untuk membedakan depenalisasi dari komersialisasi. Penelitian ini juga mematahkan argumen bahwa kebijakan terkait ganja yang ringan dapat mengarah ke penggunaan jenis narkoba yang lebih keras, karena hasil dari perubahan regulasi di Belanda membuktikan bahwa perbedaan antara ganja dan narkoba yang lebih keras justru mengurangi *gateway effect*, di mana penggunaan ganja dianggap dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan narkoba jenis lain. Kesimpulannya adalah alternatif dari regulasi ganja yang ditegakkan secara agresif layak untuk dipertimbangkan. Model kepemilikan yang didepresiasi dan kultivasi pribadi memiliki banyak keuntungan dan lebih sedikit resiko penyalahgunaan.

Selain penelitian dari Maccoun, R. dan Reuter, P, terdapat penelitian mengenai pertimbangan hukum regulasi ganja di Kanada. Artikel berjudul *Legal Considerations in Canadian Cannabis Policy* dari jurnal *Analyse De Politiques* yang ditulis oleh Solomon, R., Single, E., & Erickson, P pada tahun 1983 ini berisi pemaparan hukum dan perkembangannya,



dampak dari hukum tersebut, konsekuensi sosial dan konsekuensi individu yang merugikan dari undang-undang pelarangan kepemilikan ganja. Pada bagian kedua, penulis memberikan tiga jenis respons hukum alternatif terhadap kepemilikan ganja, yaitu: mitigasi konsekuensi dari kepemilikan ganja, pencabutan sebagian pelanggaran jabatan dan peraturan pemerintah tentang distribusi ganja. Penulis menyimpulkan bahwa undang-undang saat ini tidak lagi dapat dianggap sebagai opsi yang dapat diterima, karena hanya memberikan manfaat pencegahan marjinal. Selain itu, banyaknya kasus kepemilikan ganja yang menyumbang lebih dari 80% dari total kasus narkoba di bawah *Narcotic Control Act* menimbulkan masalah alokasi sumber daya dalam sistem peradilan pidana Kanada.

Kemudian, berikut adalah penelitian oleh Klingemann, H.K.H pada tahun 1996 dengan judul 'Drug treatment in Switzerland: harm reduction, decentralization and community response' yang dipublikasikan dalam jurnal *Addiction*. Artikel ini dimulai dengan tinjauan sejarah masalah narkoba di Swiss dari generasi *hippie* dan penutupan Letten pada tahun 1995. Kemudian penulis memaparkan tentang layanan penanganan kecanduan narkoba, terutama dari 10 tahun terakhir dan diakhiri dengan diskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem penanganan. Faktor-faktor tersebut termasuk tingkat masalah terkait narkoba, persepsi publik tentang masalah narkoba, polis desentralisasi, ideologi politik dan pengaruh politik internasional. Dalam 15 tahun, sistem penanganan pecandu di Swiss telah berkembang pesat, terutama dalam hal layanan non-residensial termasuk pemeliharaan metadon tanpa kewajiban perawatan, ruang suntikan dan uji coba resep obat yang diawasi dimulai pada tahun 1993 dan diperluas pada tahun 1994/1995. Perawatan residensial juga telah tumbuh dan beradaptasi dengan gender dan usia yang spesifik, sesuai kebutuhan klien. Pendekatan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) diterima secara luas dan memungkinkan berbagai bentuk perawatan.

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu di atas, kita bisa melihat bahwa penelitian mengenai ganja serta regulasi dan posisinya di masyarakat sudah banyak dilakukan baik di Prancis maupun negara lain. Posisi pengobatan herbal dalam dunia kesehatan sebetulnya sudah eksis sejak lama di berbagai belahan dunia, begitu juga di Indonesia. Hal ini marak dan semakin berkembang karena munculnya tren pengobatan alternatif untuk penyakit-penyakit serius dan penanganan para pasien dalam tahap terminal. Di Prancis sendiri, penelitian dengan korpus kebijakan pada masa pemerintahan Emmanuel Macron belum dilakukan, terutama karena kebijakan-kebijakan ini masih sangat baru. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami kondisi Prancis dan perkembangan terbaru dari sikap yang diambil pemerintah terhadap permasalahan konsumsi ganja ini. Penelitian ini juga dapat membantu penelitian lain dengan memberikan informasi pendukung atau contoh kasus implementasi suatu kebijakan terkait ganja di Prancis.

Penegakkan undang-undang dan regulasi ganja di Prancis dianggap sebagai salah satu hukum ganja paling represif di Uni Eropa (Guba, 2018). Namun, terdapat kontradiksi karena menurut badan pengawas narkoba di Eropa, EMCDDA, Prancis merupakan negara dengan persentase pengguna ganja tertinggi di Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah Macron menyikapi permasalahan konsumsi ganja di Prancis dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu

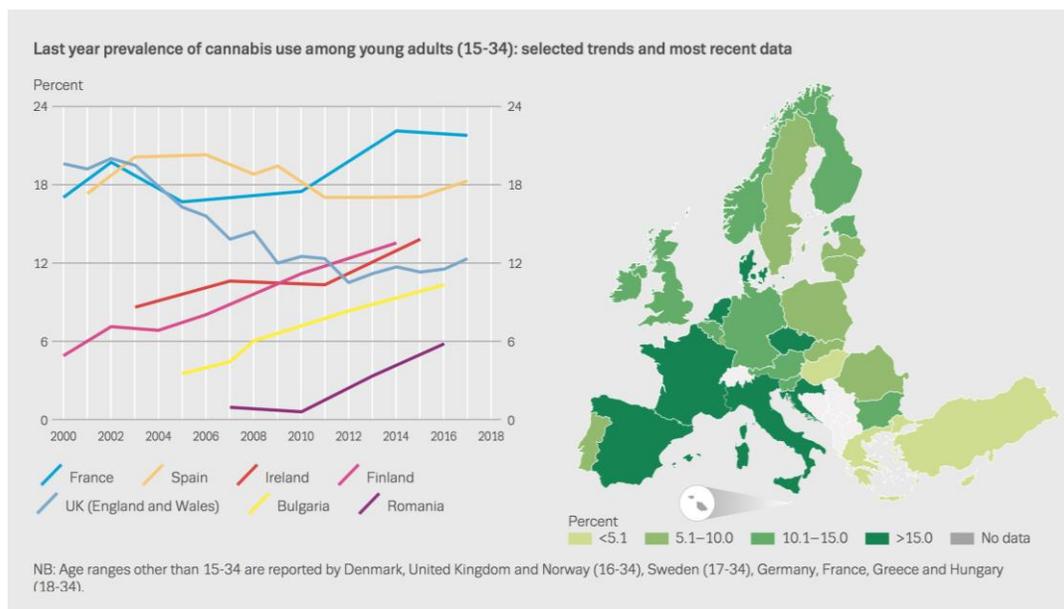


Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik, dan berupaya menafsirkan makna dari data tersebut untuk membantu memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang telah ditargetkan (Crossman, 2020). Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengetahui dampak dari penerapan kebijakan ganja yang represif terhadap masyarakat Prancis dan bagaimana pemerintahan Emmanuel Macron menanggapi permasalahan yang muncul dari kebijakan tersebut. Sumber data yang digunakan adalah kebijakan ganja pada masa pemerintahan Emmanuel Macron serta informasi terkait seperti data dari L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Penelitian ini berfokus pada kebijakan terkait yang dibuat selama masa pemerintahan Emmanuel Macron, sehingga dibatasi pada rentang waktu 2017 sampai dilaksanakannya penelitian ini, yaitu 2020.

Konsumsi Ganja di Prancis

Menurut *European Drug Report 2019*, Sekitar 91,2 juta orang dewasa berusia 15-64 tahun di Uni Eropa diperkirakan telah mencoba ganja selama hidup mereka. EMCDDA juga menyatakan dalam laporannya bahwa tingkat prevalensi tahun 2018 di kelompok usia tersebut berkisar dari 3,5% di Hongaria hingga 21,8% di Prancis (grafik 1). Menurut data tersebut, Prancis memiliki angka pengguna ganja tertinggi di Uni Eropa dengan tingkat pengguna ganja seumur hidup sekitar 45% dan tingkat prevalensi sebesar 21,8% sementara rata-rata prevalensi di Uni Eropa sebesar 14,4%. Hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini.

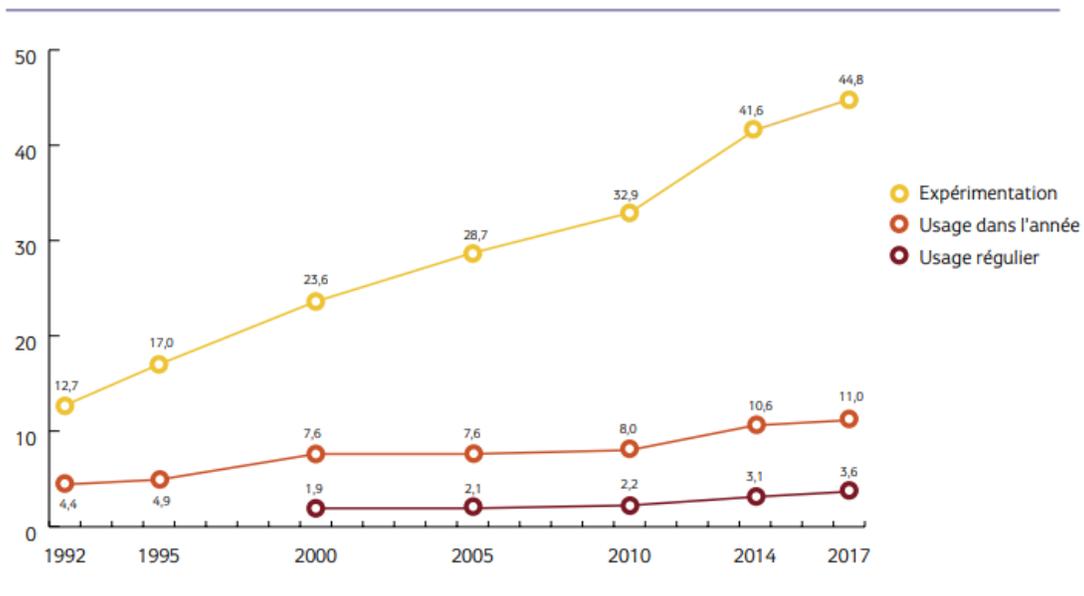


Grafik 1.

Persentase Prevalensi Ganja di Uni Eropa Tahun 2018. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2019), *European Drug Report 2019: Trends and Developments*.

Berdasarkan hasil survei populasi umum yang dilakukan di Prancis pada tahun 1992-2017 oleh Santé publique France dan L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) dalam *Tendances n° 128: Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2017*, ganja merupakan zat psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis. Selama 25 tahun tersebut, difusi ganja terus meningkat dengan perincian sebagai berikut: tingkat penggunaannya adalah 12,7% pada tahun 1992, 23,6% pada tahun 2000, 32,9% pada tahun 2010, 41,6% pada tahun 2014, sebelum mencapai 44,8% pada tahun 2017 (grafik 2). Menurut laporan OFDT tahun 2019 dalam *Drogues, Chiffres clés* [ed. 8], hasil survei terbaru yang dilakukan tahun 2018 pada 18 juta penduduk Prancis berusia 18-64 tahun mengindikasikan bahwa di antaranya, 5 juta orang telah mengkonsumsi ganja selama tahun 2018, terdapat 1,5 juta orang merupakan pengguna rutin dan 900.000 orang mengkonsumsinya sehari-hari. OFDT menyatakan bahwa jumlah orang yang pernah mengkonsumsi ganja di Prancis meningkat, sementara pengguna rutin ganja cenderung stabil sejak tahun 2014.

Figure 1. Évolution des niveaux d'usage de cannabis entre 1992 et 2017, parmi les 18-64 ans (en %)



Grafik 2.

Penggunaan Ganja di Prancis Tahun 1992-2017, Santé publique France, & OFDT. (2018). *Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2017*

OFDT juga menyatakan bahwa terjadi peningkatan pada angka penyitaan tanaman ganja sejak tahun 2010 yang menjadi bukti pembentukan budidaya tanaman ganja di Prancis, termasuk tanaman untuk konsumsi pribadi dan perkebunan yang dikendalikan secara khusus oleh struktur



kejahatan terorganisir. Dari data tersebut, OFDT memperkirakan 150.000 - 200.000 konsumen membudidayakan tanaman ganja sendiri.

Status Hukum Ganja di Prancis

Penggunaan dan kepemilikan obat-obatan terlarang adalah pelanggaran kriminal di Prancis. Ben Lakhdar (2018) menyatakan bahwa banyak negara dan beberapa negara bagian Amerika yang telah melegalkan ganja atau setidaknya secara substansial memodifikasi undang-undang mereka. Namun, Prancis sebagai salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa, masih berpegang teguh pada kebijakan larangan berdasarkan hukum 31 Desember 1970. Di Prancis, budidaya, penjualan, kepemilikan, dan konsumsi ganja menyandang status ilegal secara hukum yang diatur dalam *La loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970* yang digantikan dengan *Article L3421-1, Code de la santé publique*, dengan bunyi yang sama, yaitu:

“L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.”

Penggunaan ilegal salah satu zat atau tanaman yang diklasifikasikan sebagai narkotika dapat dihukum satu tahun penjara dan denda 3.750 euro. (diterjemahkan oleh penulis)

Dalam hukum Prancis tidak ada perbedaan antara ganja dan jenis narkotika lain, dan pelanggaran terkait narkoba dianggap sangat serius. Ganja merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam daftar substansi yang diklasifikasikan sebagai narkotika dalam *Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (Peraturan Pemerintah 22 Februari 1990 menetapkan daftar zat yang tergolong narkotika)*. Regulasi Prancis juga secara khusus melarang semua operasi yang berkaitan dengan ganja, termasuk produksi, kepemilikan, dan penggunaannya dalam pasal *Article R. 5132-86 du code de la santé publique*, kecuali untuk keperluan penelitian dan medis.

Undang-undang tersebut tidak membedakan antara kepemilikan untuk penggunaan pribadi atau untuk perdagangan, atau berdasarkan jenis zat. Namun, jaksa penuntut akan memilih hukuman yang berkaitan dengan penggunaan atau perdagangan berdasarkan jumlah narkoba yang ditemukan dan konteks kasus. Pelanggar yang didakwa dengan penggunaan pribadi menghadapi hukuman penjara maksimum 1 tahun dan denda, meskipun dalam kasus kecil penuntutan dapat dicabut atau disederhanakan. Produsen atau pemasok obat-obatan terlarang dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda, atau 10 tahun dalam keadaan tertentu. Hukuman penjara seumur hidup dan denda hingga 7,5 juta euro dimungkinkan bagi kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Hukuman maksimum meningkat jika pelaku membahayakan pengguna transportasi atau jika pelanggaran dilakukan oleh pegawai negeri saat bertugas. Seperti halnya banyak kejahatan lain, hukuman dapat digandakan jika terjadi pelanggaran berikutnya dalam periode 5 tahun.



Ganja dan Masyarakat Prancis

Angka pengguna ganja di Prancis yang terus meningkat menunjukkan bahwa permintaan masyarakat akan produk ganja di Prancis masih tergolong tinggi, hal ini tentu saja mempengaruhi pasar ganja di Prancis. Menurut Gandilhon, M., Spilka, S., & Masson, C. (2019), permintaan ganja yang terus meningkat ini sebagian besar dipasok oleh Belanda dan Spanyol, sementara produksi lokal Prancis didominasi oleh kebun skala kecil yang diproduksi oleh "amatir" yang tidak dapat memenuhi permintaan domestik. Hal ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pasar ganja di Prancis, terutama pada jaringan penjualan tradisional, yang lebih terspesialisasi dalam perdagangan *résine* (*hashish* atau resin) atau ekstrak ganja yang merupakan hasil pemisahan daun atau tunas dengan zat resin. Meningkatnya persaingan ini mendesak produsen *résine* untuk berusaha beradaptasi dengan keadaan baru ini dengan memasarkan varietas ganja atau bahkan produk turunannya yang lebih beragam, dan berupaya mengembangkan produksinya sendiri. Di sisi lain, selama beberapa tahun ini, produksi *résine* dari Maroko juga mengalami pergolakan, khususnya dalam varietas yang dibudidayakan, dengan adanya modernisasi teknik pertanian, yang memungkinkan produksi ganja yang lebih beragam.

Menurut Cornell, S. E. (2012), keterlibatan kelompok teroris dalam penyelundupan narkoba juga terlibat secara langsung dalam perdagangan dan penyelundupan manusia. Maroko, sebagai produsen ganja terbesar di dunia, merupakan salah satu pemasok pasar ganja Eropa. Namun, rute yang digunakan untuk menyelundupkan ganja ke Spanyol dan Prancis juga digunakan sebagai jalur penyelundupan migran ilegal. Hal ini difasilitasi oleh jaringan perdagangan ilegal yang sudah ada sebelumnya. Pada tahun 2000, kepolisian Spanyol tidak hanya menemukan lonjakan imigran ilegal, tetapi juga menemukan bahwa penyelundup memaksa migran untuk mengangkut ganja ke Spanyol. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat Prancis terhadap imigran

Diskriminasi atau tindakan rasis terkait ganja terhadap kelompok minoritas tertentu didasari oleh stigma yang menganggap kelompok minoritas, terutama yang berasal dari Afrika Utara, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan pelanggaran undang-undang anti ganja. Menurut Paoli, L., & Reuter, P. (2008) dalam artikel *Drug Trafficking and Ethnic Minorities in Western Europe*, anggota etnis minoritas memiliki andil besar dalam pasar narkoba di sebagian besar kota-kota di Eropa Barat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah status sosial ekonomi yang rendah serta marginalisasi budaya yang membuat mereka memiliki peluang mendapat pekerjaan yang lebih kecil dan terpaksa bekerja di sektor ekonomi ilegal. Namun hal ini tidak berlaku pada keseluruhan sektor narkoba karena ganja terbukti sebagai satu-satunya narkotika berbasis tumbuhan yang pasarnya tidak didominasi oleh suatu etnis atau kebangsaan tertentu meskipun Maroko merupakan negara produsen ganja terbesar di dunia, sedangkan produksi dan distribusi narkoba sintetis didominasi oleh orang-orang 'asli' Eropa seperti Belanda dan Belgia.

Informasi mengenai penggunaan dan permintaan akan ganja di Prancis yang terus meningkat sejak diberlakukannya undang-undang anti ganja berbanding terbalik dengan tujuan awal diberlakukannya kebijakan tersebut. Peningkatan permintaan di pasar ganja Prancis yang sebagian besar dipasok oleh negara-negara sekitar juga menimbulkan peningkatan pada kasus



pelanggaran seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan sosial dalam masyarakat Prancis, karena kelompok imigran atau kelompok etnis tertentu yang cenderung menjadi sasaran diskriminasi dan disalahkan atas permasalahan ini. Kebijakan Prancis terkait ganja yang masih dipertahankan ini seakan memperburuk keadaan dan menimbulkan aksi kriminal lain alih-alih mengatur dan mencegah hal-hal ini terjadi.

Polemik Kebijakan Ganja di Prancis

Pada tahun 2018, organisasi non-profit yang berkecimpung dalam sosialisasi penyakit AIDS, AIDES, bersama Médecins du Monde (Asosiasi kesehatan dan kemanusiaan), Ligue des Droits de l'Homme (Liga Hak Asasi Manusia), dan organisasi dari bidang-bidang lain mengeluarkan sebuah buku acuan antarasosiasi *Livre blanc inter-associatif sur l'article 37 du Projet de loi de programmation 2018-2022 éfort de rme de la justice* yang berisikan protes terhadap kelemahan dalam kebijakan pemerintah *l'article 37 du Projet de loi de programmation 2018-2022* yang represif dan berasal dari undang-undang tahun 1970 dianggap sudah tidak relevan. Mereka memaparkan bahwa kebijakan ini terbukti tidak efektif dan kontraproduktif. Mereka menganggap pemerintah kurang memahami bahwa konsumsi produk psikoaktif legal dan ilegal bersifat kultural, kurang menghargai hak-hak dasar pengguna yang menjadi target diskriminasi dan stigmatisasi, tidak menetapkan kebijakan publik yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan risiko kesehatan, serta menetapkan kebijakan dengan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi. Mereka merasa bahwa peperangan Prancis melawan narkoba sudah mencapai jalan buntu dan sudah waktunya untuk mempertimbangkan cara lain untuk menghadapi permasalahan ini. Pada intinya, buku acuan ini menjelaskan bahwa diperlukan pemutakhiran acuan untuk penetapan kebijakan mengenai status penggunaan, produksi, dan pendistribusian ganja. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memikirkan pula sisi budaya dan kemanusiaan dalam pengaturan hal tersebut.

Pada bulan Juni 2019, *conseil d'analyse économique* (CAE) mengeluarkan *Les notes du conseil d'analyse économique n° 52* berjudul "*Cannabis: comment reprendre le contrôle ?*" Dokumen ini merekomendasikan pemerintah untuk memonopoli produksi dan distribusi ganja. Menurut laporan CAE, legalisasi ganja yang diawasi secara ketat akan memungkinkan pemerintah untuk memerangi kejahatan terorganisir, membatasi akses untuk anak di bawah umur dan mengembangkan sektor ekonomi yang akan menciptakan pekerjaan dan pendapatan pajak. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menjaga kualitas dan kuantitas produk yang cukup, dan membayar produsen dengan cukup sambil menjaga harga pasar yang rendah untuk memerangi pasar ilegal. Kemudian, diperlukan peningkatan kebijakan pencegahan dan pendidikan pada tahap sekolah, juga di antara keluarga dan petugas kesehatan. Terakhir, alokasi sebagian dari pendapatan pajak dari ganja untuk kebijakan perkotaan dan pendidikan di daerah-daerah perdagangan manusia. Dokumen ini juga merupakan acuan beberapa anggota parlemen dalam mengajukan RUU untuk melegalkan distribusi dan penggunaan ganja, sebuah langkah yang menurut CAE dapat meningkatkan sebanyak € 2,8 miliar dalam tambahan penerimaan pajak tahunan dan membuka lapangan pekerjaan baru.



Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat

Sejak disahkannya *Droit de la Drogue* pada Desember 1970 hingga saat ini, Prancis tetap dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ganja. Survei yang dilakukan oleh *Santé publique France* dan OFDT selama tahun 1992-2017 menunjukkan peningkatan pada angka pengguna ganja, hingga mencapai 44,8% pada tahun 2017. Permintaan ganja yang terus meningkat ini sebagian besar dipasok dari luar Prancis. Para penyelundup lantas memaksa migran ilegal untuk mengangkut ganja ke negara-negara Eropa sehingga, penyelundupan ganja juga berkaitan dengan perdagangan manusia dan imigran ilegal yang masuk ke Prancis. Tidak hanya itu, kriminalisasi ganja juga berpengaruh pada tindakan rasis dan diskriminasi terhadap imigran atau keturunan imigran, terutama orang kulit hitam dan keturunan Arab sebagaimana diungkapkan dalam sebuah studi tahun 2009 yang dilakukan oleh *Open Society Justice Initiative* dan *Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)*, perang Prancis terhadap narkoba secara tidak proporsional menargetkan komunitas minoritas Arab dan Muslim, yang diyakini oleh para legislator dan polisi sebagai pedagang dan distributor utama produk psikoaktif ilegal tersebut. Keengganan untuk mereformasi undang-undang ini juga telah menghambat penelitian dan undang-undang penggunaan ganja untuk keperluan medis, sehingga warga Prancis yang membutuhkan pengobatan berbasis *cannabis* harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkannya.

Kerugian dan permasalahan yang muncul dari regulasi ganja ini menunjukkan ketidakefektifan undang-undang yang berlaku. Pemerintah telah menerima protes dan desakan dari banyak pihak, termasuk dari anggota parlemen sendiri. Namun, pemerintah tetap tidak melakukan apapun. Menurut Senator Esther Benbassa dalam wawancara dengan *Le Parisien*, keengganan untuk mereformasi regulasi ini berasal dari politisi dan konstituensi yang “terlalu konservatif”.

Kebijakan Baru sebagai Respon Pemerintahan Emmanuel Macron

Menanggapi permasalahan ini, Presiden Macron menyatakan rencana dekriminialisasi parsial dalam kasus kepemilikan ganja ringan sebagai upaya membebaskan waktu polisi untuk menangani kejahatan yang lebih serius. Rencana ini awalnya disebutkan dalam kampanyenya dalam Pemilihan Presiden tahun 2017. Prancis kemudian menerapkan peraturan baru pada tahun 2018 di mana orang yang ditemukan dengan ganja untuk penggunaan pribadi (tidak dalam jumlah besar) akan diberi denda yang jauh lebih ringan, yaitu € 150-200, dari denda sebelumnya € 3,750. Menurut sebuah artikel berjudul *Harsh laws and high usage: France looks to reform its drug policies* yang dipublikasikan oleh situs berita france24.com pada tanggal 3 Januari 2018, disebutkan bahwa menurut laporan *Assemblée Nationale* yang dirilis awal tahun itu, jumlah penangkapan terkait narkoba di Prancis mengalami peningkatan sebesar 10,6 kali lipat dalam 15 tahun, menjadi hampir 140.000 kasus pada tahun 2016 (atau 67,5% dari semua penangkapan) sejak disahkan undang-undang yang mengkriminalisasi narkoba pada 31 Desember 1970. Total biaya yang dikeluarkan negara Prancis dalam upaya memerangi narkoba adalah sebesar 2 miliar Euro, atau 0,1 persen dari total PDB (produk domestik bruto) negara Prancis pada tahun 2014. Dari total pengeluaran tersebut, 42,5% dana dialokasikan untuk penegakan hukum sementara lebih dari 80% kasus merupakan pelanggaran terkait ganja yang tidak tergolong jenis narkotika keras. Pengenaan



denda tarif tetap bertujuan untuk membantu homogenisasi undang-undang narkoba Prancis dan mengurangi beban administrasi di pengadilan dan polisi. Menteri Dalam Negeri Gérard Collomb mengatakan kepada France24 bahwa pemberlakuan tarif tetap ini akan meminimalkan prosedur legal yang terlalu memakan waktu untuk penegakan hukum dan keadilan, sehingga pemerintah dapat memprioritaskan perang melawan perdagangan manusia.

Selain meringankan hukuman kepemilikan ganja, pada bulan Desember 2018, pemerintah mencanangkan *le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022*, sebuah program berdurasi lima tahun yang menargetkan seluruh jenis zat psikoaktif dan perilaku adiktif yang berfokus pada pencegahan dan pemberian perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan berdasarkan usia mereka atau hal lain yang membuat mereka lebih berisiko. Pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas tanggapan terhadap kecanduan individu dan masyarakat, serta menunjukkan komitmen untuk memerangi perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah juga merencanakan langkah-langkah lain seperti penelitian, observasi dan pengembangan kerjasama internasional. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Prancis adalah melakukan percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik dengan mengikuti rekomendasi dari sekelompok ahli. *Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé* (ANSM) memutuskan pada Januari 2019 untuk meluncurkan rencana percobaan pada ganja untuk tujuan terapeutik yang dibatasi penggunaannya. Menurut artikel berita berjudul *Le cadre de l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France dévoilé* yang dipublikasikan pada situs lemonde.fr, percobaan akan dimulai pada awal 2020 dan dijadwalkan berlangsung dua tahun: enam bulan implementasi, enam bulan inklusi pasien, enam bulan pemantauan pasien dan enam bulan analisis data. Relawan spesialis medis yang telah dilatih sebelumnya akan diberikan wewenang untuk memberikan resep kepada pasien yang memenuhi syarat dan tergolong dalam salah satu dari 5 indikasi, yaitu: nyeri neuropatik refrakter, bentuk tertentu dari epilepsi parah dan resisten terhadap obat, perawatan onkologi suportif dalam situasi paliatif, multi-sclerosis, atau patologi lain dari sistem saraf pusat. Secara umum, resep akan selalu diperlakukan sebagai pilihan terakhir. Ganja terapeutik ini akan disalurkan dalam bentuk sublingual dan inhalasi, atau oral.

KESIMPULAN

Penggunaan dan permintaan akan ganja di Prancis yang terus meningkat sejak diberlakukannya undang-undang anti ganja berbanding terbalik dengan tujuan awal diberlakukannya kebijakan tersebut. Peningkatan permintaan di pasar ganja Prancis yang sebagian besar dipasok oleh negara-negara sekitar juga menimbulkan peningkatan pada kasus pelanggaran seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan sosial dalam masyarakat Prancis, karena kelompok imigran atau kelompok etnis tertentu yang cenderung menjadi sasaran diskriminasi dan disalahkan atas permasalahan ini. Kebijakan Prancis terkait ganja yang masih dipertahankan ini seakan memperburuk keadaan dan menimbulkan aksi kriminal lain alih-alih mengatur dan mencegah hal-hal ini terjadi.

Oleh sebab itu, pemerintah banyak menerima protes dan desakan untuk melegalkan ganja atau setidaknya mereformasi undang-undang yang dianggap gagal tersebut karena tidak hanya sistem ini tidak mampu melindungi yang paling rentan, terutama kaum muda, tetapi juga sangat



membebani pengeluaran publik dan menguntungkan kejahatan terorganisir. Namun, pemerintah Prancis memilih untuk mempertahankan undang-undang tersebut karena kuatnya kelompok konservatif dalam pemerintah dan pihak yang khawatir akan dampak kesehatan publik dari penggunaan ganja umumnya menentang dekriminalisasi atau legalisasi ganja untuk penggunaan rekreasi. Meskipun demikian, Emmanuel Macron mengambil jalan tengah dengan secara perlahan mengubah regulasi ganja yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan, dengan dekriminalisasi parsial dan diberlakukannya percobaan ganja untuk tujuan terapeutik yang direncanakan mulai berjalan pada 2020. Dengan begitu, pada pemerintahan Emmanuel Macron, Prancis dapat dianggap telah memasuki periode perubahan.

Namun demikian, perdebatan dan diskusi mengenai kebijakan berkenaan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi ganja, khususnya di Prancis, masih merupakan sebuah percakapan yang kental dengan kontradiksi antara aspek praktis dan etis. Hingga kini, Prancis masih memperbolehkan penggunaan ganja untuk pengobatan. Hal ini diperbolehkan sebagai proses percobaan hingga 31 Maret 2023. Selanjutnya, Prancis akan menyesuaikan kembali undang-undangnya sesuai dengan situasi aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Auriola, E., & Geoffardb, P.-Y. (2019). *Cannabis : comment reprendre le contrôle ?* (Les notes du conseil d'analyse économique, n° 52)
- Béguin, F. (2019). Le cadre de l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France dévoilé. *Le Monde*. Diakses dari: https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/19/le-cadre-de-l-experimentation-du-cannabis-therapeutique-devoile_5478579_3224.html
- Ben Lakhdar, C. (2018). L'inéluctable légalisation du cannabis en France : Une approche néo-institutionnelle. *Revue d'économie politique*, vol. 128(6), 1101-1122. doi:10.3917/redp.286.1101.
- Chhor, K. (2018, 3 Maret). Harsh laws and high usage: France looks to reform its drug policies. France 24. <https://www.france24.com/en/20180228-harshest-laws-highest-drug-usage-france-legalisation-cannabis-reform-laws-policy>
- Cornell, S. E. (2012). The interaction of drug smuggling, human trafficking, and terrorism. dalam A. Jonsson (Ed.), *Human Trafficking and Human Security* (pp. 48–65). Abingdon, Oxon: Routledge.
- Crossman, A. (2011). *What is qualitative research?* ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/qualitative-research-methods-3026555>
- Direction de l'information légale et administrative, (2021). *Cannabis thérapeutique*. <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35817>
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018), *Cannabis legislation in Europe: an overview*, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2019), *European Drug Report 2019: Trends and Developments*, Publications Office of the European Union, Luxembourg
- Gandilhon, M., Spilka, S., & Masson, C. (2019). *LES MUTATIONS DU MARCHÉ DU CANNABIS EN FRANCE*. Théma OFDT.



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

- Klingemann, H. K. H. (1996). Drug treatment in Switzerland: harm reduction, decentralization and community response. *Addiction*, 91(5), 723–736. doi: 10.1046/j.1360-0443.1996.9157238.x
- Le Gouëz, C. (2018). Livre blanc inter-associatif sur l'article 37 du Projet de loi de programmation 2018-2022 éfort de rme de la justice [Edition de novembre 2018]. Diakses dari: https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/livre_blanc_final_web_2.pdf
- Maccoun, R., & Reuter, P. (2001). *Evaluating alternative cannabis regimes*. *British Journal of Psychiatry*, 178(2), 123–128. doi: 10.1192/bjp.178.2.123
- OFDT. (2019). *Drogues, Chiffres clés* [ed. 8]. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
- OFDT. (2019). *Drogues : perceptions des produits, des politiques publiques et des usagers*. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
- Paoli, L., & Reuter, P. (2008). Drug Trafficking and Ethnic Minorities in Western Europe. *European Journal of Criminology*, 5(1), 13–37. doi: 10.1177/1477370807084223
- Santé publique France, & OFDT. (2018). *Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2017* [Tendances n ° 128]. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
- Solomon, R., Single, E., & Erickson, P. (1983). Legal Considerations in Canadian Cannabis Policy. *Canadian Public Policy / Analyse De Politiques*, 9(4), 419-433.